

SKRIPSI

**KETERWAKILAN MASYARAKAT PAPUA DALAM KEBIJAKAN OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA JILID II**



DISUSUN OLEH :

Stevie Nanda Putra Maury 071811333103

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**KETERWAKILAN MASYARAKAT PAPUA DALAM KEBIJAKAN OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA JILID II**



DISUSUN OLEH :

Stevie Nanda Putra Maury 071811333103

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selaku penyusun kecuali dituliskan dengan format kutipan (langsung ataupun tidak langsung) dalam isi skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Manokwari, 29 Juni 2022

Penulis



(Stevie Nanda Putra Maury)

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAKSUD PENULISAN SKRIPSI

**KETERWAKILAN MASYARAKAT PAPUA DALAM KEBIJAKAN OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA JILID II**

SKRIPSI

Maksud: Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan

Studi S1 Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Airlangga

Disusun Oleh

Stevie Nanda Putra Maury

NIM:071811333103

Semester Genap 2021/2022

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PERSEMBAHAN

‘Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya kasihi, di saat saya kehilangan kepercayaan diri saya, mereka selalu ada untuk dapat mempercayai diriku’

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) DALAM KEBIJAKAN OTONOMI
KHUSUS (OTSUS) PROVINSI PAPUA JILID 2**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 20 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Ucu Martanto S.IP., MA. NIP.

197903272009121003

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan Komisi Penguji:

Program Studi Sarjana Ilmu Politik

Departemen Politik

Universitas Airlangga

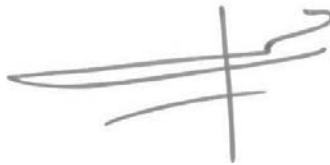
Pada Hari: Senin

Tanggal: 6 Juni 2022

Pukul: 15:00 WIB

Komisi Penguji terdiri dari

Ketua Penguji



Prof. H. Kacung, Drs., MA., Ph.D.
NIP. 196403251989031002

Anggota



Drs. Haryadi, M.Si.
NIP. 195805091987011001

Anggota



Ucu Martanto, S.IP., MA
NIP. 197903271009121003

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dibentuk lembaga yang mewakili Masyarakat Papua (MRP). Penelitian ini membahas mengenai peran MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam kebijakan Otonomi Khusus yang akan berlanjut. Penulis menggunakan Teori *Deliberatif Analyses* sebagai teori yang relevan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi masyarakat Papua, yang mendapat keadilan dan kesejahteraan dari Otonomi Khusus ini. Penerapan Otonomi Khusus jilid 2 ini dirasa belum dapat memberikan solusi bagi permasalahan di daerah dan kurangnya keterlibatan masyarakat Lokal dalam menyuarakan berbagai Aspirasinya sehingga banyak diintervensi oleh Pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MRP (Majelis Rakyat Papua) telah berupaya dalam penyampaian aspirasi dari masyarakat Papua sejalan dengan Teori *Deliberatif Analyses* agar dapat menciptakan demokrasi yang adil bagi masyarakat di Papua dalam hal ini berjalannya Otonomi Khusus yang mewujudkan Pembangunan dan kesejahteraan di daerah dalam berbagai sektor.

Kata Kunci : MRP, Otonomi khusus, Papua, dan Deliberatif

ABSTRACT

Based on Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province, an institution representing the Papuan Community (MRP) was formed. This study discusses the role of the MRP (Majelis Rakyat Papua) in the ongoing Special Autonomy policy. The author uses Theory Deliberative Analysis as a relevant theory in analyzing the problems that occur in the Papuan people, who receive justice and prosperity from this Special Autonomy. The implementation of Special Autonomy volume 2 is felt to have not been able to provide a solution to problems in the region and the lack of involvement of local communities in voicing their various aspirations so that many are intervened by the Center. The results of this study indicate that the MRP (Majelis Rakyat Papua) has attempted to convey the aspirations of the Papuan people in line with the Deliberative Analysis order to create a just democracy for the people in Papua, in this case the special Autonomy that realizes development and prosperity in the region in various sectors. .

Keywords: MRP, Special Autonomy, Papua and Deliberative

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pimpinan-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan tugas penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Keterwakilan Masyarakat Papua dalam Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Jilid II”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung serta membantu dalam pengerjaannya. Terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan data, informasi dan pemaparan dalam pengerjaan penelitian.
2. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat yang memberikan kesempatan untuk dapat berkuliah di Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
4. Ucu Martanto, S.IP., M.A. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman terhadap penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama berkuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini berjalan.
6. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi tersebut.
7. Caren Winokan yang selalu membantu dalam doa dan semangat
8. Viola, Valda dan juga teman-teman Ilmu Politik yang membantu memberikan dukungan dalam menyelesaikan Penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan yang semakin baik. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang telah bersedia membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis:

1. Kedua orang tua yang mendukung dan memberikan motivasi agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini;
2. Pak Ucu Martanto selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan arahan dan juga bimbingan terkait skripsi saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen dan Staff Departemen Ilmu Politik; dan
5. Pihak-pihak yang tidak disebutkan.

Penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan Skripsi ini dan penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi ilmu yang dapat dipelajari pembaca, penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Manokwari, 2 Juli 2022



Stevie Nanda Putra Maury

DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Sampul	ii
Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat	iii
Maksud Penulisan Skripsi	iv
Halaman Persembahan	v
Persetujuan Pembimbing	vi
Pengesahan Panitia Penguji	vii
Abstrak (Bahasa Indonesia).....	viii
Abstract (Bahasa Inggris)	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Halaman Ucapan Terimakasih	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Definisi Konseptual	7
1.5.1 Masyarakat asli Papua (OAP)	7
1.5.2 Majelis Rakyat Papua (MRP)	7
1.5.3 Kebijakan Publik	8
1.5.4 Otonomi Khusus Provinsi Papua	8
1.5.5 Ruang Publik	9
1.6 Kerangka Konseptual	9
1.6.1 Teori kebijakan Deliberatif	9
1.6.1.1 Analisis kebijakan Deliberatif (Deliberativ Policy Analysis)	11
1.7 Metode Penelitian	12

1.8.1 Fokus Penelitian	12
1.7.2 Tipe Penelitian	13
1.7.3 Subyek Penelitian	13
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.5 Teknik Analisis Data	14

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Keadaan Demografis	16
2.2 Provinsi Papua dan Papua Barat	17
2.3 Pemerintahan Papua era Orde baru dan era Reformasi	18
2.3.1 Pemerintahan Papua Era Orde Baru	18
2.3.2 Pemerintahan Era Reformasi	19
2.4 Gambaran Umum Otonomi Khusus Papua	21
2.5 Tujuan Otsus Papua	22
2.6 Persepsi masyarakat daerah terhadap Otsus	23
2.7 Sosial Budaya dan Adat masyarakat Papua	24
2.8 Ekonomi masyarakat Papua	26
2.9 Implikasi Otsus	27
2.10 Gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka)	27

BAB III TEMUAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Temuan Data	30
3.1.1 Perubahan UU Otonomi Khusus sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di Daerah mendapat penolakan dari masyarakat Papua	30
3.1.1.1 Kegagalan Otsus Jilid 1 dalam pengaruh keberlanjutannya	31
3.1.1.2 Pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua	34
3.1.1.3 Rekonsiliasi Daerah ke Pusat	36
3.1.1.4 Pendekatan Pusat kepada Masyarakat	38
3.1.1.5 Dana Otsus Papua	39
3.1.1.6 Pemekaran daerah Papua	40
3.1.2 Respon MRP terhadap rencana Perubahan dari UU Otonomi Khusus	42
3.1.2.1 Inisiatif MRP dalam perbaikan pelaksanaan Otsus jilid 2	42
3.2 Interpretasi Teori	47

BAB IV KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
Daftar Pustaka	55
Lampiran	59

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Pembagian wilayah Adat Papua.....	25
Gambar 3.1 Grafik Kekerasan Aparat di Papua.....	32
Gambar 3. 2 Demo penolakan Otsus jilid 2 di Manokwari	34
Gambar 3.3 Rapat koordinas Bersama Wapres, Jajaran Mentri, Gubernur Bupati, dan kepala- kepala OPD Provinsi Papua Barat.....	38
Gambar 3.4 Rakornas Kesbangpol penentuan tata cara pemilihan anggota DPRPB dan DPRK 2024.....	45
Gambar 3.5 Persebaran Jumlah anggota Dewan Jalur Otsus 2024 perwilayah	50

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Kekuatan Aktor Informal dan Formal	49
--	----